

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN  
RPJMD KOTA TOMOHON****SYARON BRIGETTE LANTAEDA  
FLORENCE DAICY J. LENGKONG  
JOURIE M RURU**

*Abstract : Development is a process of continuous improvement of a society or a social system as a whole towards a better life. The government is the most important party and acts as a driver in development, namely through development planning. Development planning is a government effort to coordinate all economic decisions in the long run to directly influence and control the growth of important economic variables. In Law no. 25 Year 2004 About National Development Planning System, Development Planning Agency at Sub-National Level has an important role in implementing regional planning. Local development planning planned by Bappeda starts from the village / sub-district, sub-district, district and city level, to the provincial level through (Development Planning Meeting). In the planning of this regional development required the participation of local communities in the implementation of development in the region. The role of Regional Development Planning Board is very complex in the implementation of regional development planning, meaning that all areas of development planning are handled under the Regional Development Planning Board, as well as regional economic development planning. This study aims to find out how the role of the Regional Development Planning Agency) in Tomohon City. Data collection is done by interviewing key informants (key informants), observation and documentation. The method used in this research is descriptive that is the method used to analyze the data by describing or describing the data that has been collected as it is. Based on the results of research conducted shows that the Role of Development Planning Agency (Tomohon City. This can be seen from the role indicator that is based on the main tasks and functions of Bappeda itself, the mechanism by which Development Planning Agency at Sub-National Level in improving economic development and the problems faced in the development planning.*

*Keywords: Role, Regional Development Planning Board, Development of Medium Term Development Plan Area*

**PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemerintah daerah sebagai pemerintah integral dari sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya di kota Tomohon. Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA di kota Tomohon haruslah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung dibawah koordinasi

Walikota pengawasan internalnya ada pada inspektorat, hal ini ditekankan mengingat pembangunan diwilayah daerah pemerintah di kota Tomohon dirasakan belum maksimal dan merata. Perencanaan pembangunan daerah haruslah disokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan dan setelah dilantiknya Walikota Tomohon dengan visi dan misi yang baru, maka disusun pula RPJMD yang baru. Dan dalam penyusunan RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah, serta dalam penyusunan RPJMD maka koordinasi yang paling utama ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di

daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson In Vancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif  
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif  
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif  
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi –

fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

## **B. Peran BAPPEDA**

Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kota Tomohon dalam menjalankan programnya yaitu berpedoman pada rencana strategi dan program-program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan di jadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang perencanaan. Untuk itu kondisi yang diharapkan BAPPEDA Kota Tomohon pada masa yang akan datang:

1. Melakukan koordinasi perencanaan yang matang antara dinas-dinas yang terkait.
2. Mengoptimalkan hubungan kerja antara BAPPEDA dengan dinas-dinas dalam rangka keserasian pelaksanaan tugas.
3. Program-program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan sudah terencana, baik administrasi, teknis, biaya.
4. Mengoptimalkan koordinasi internal di lingkungan BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Sebagai tenaga-tenaga perencana masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus sesuai dengan kualifikasi.
6. Perlu adanya penelitian yang akurat untuk kepentingan pembangunan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAPPEDA Kota Tomohon pada bulan Juni-Juli 2017

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan subyek penelitian yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Husaini dan Purnomo (2009:101) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat informasi apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian analisis dengan kata-kata yang melatar belakangi informan berperilaku seperti itu, direduksi, distrigulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

### **Responden Penelitian**

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari informan yang ditentukan. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder sebagai pelengkap/pendukung yaitu data yang bersumber pada dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
3. Kabid Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Sosial Budaya
4. Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5. Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Kabid Penelitian dan Pengembangan

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2005:62), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang di peroleh oleh peneliti yaitu melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan tentang Peran BAPPEDA Dalam Penyusunan RPJMD, serta mencatat informasi dari informan, serta data-data yang diperoleh secara sistematis dari beberapa objek pengamatan (dokumen) yang dianggap mendukung serta dapat diperoleh pada lokasi penelitian, yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian

**Teknik Analisis Data Menurut Moleong (2004:280-281),** Teknik analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Penelitian memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan data mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh informan dengan melakukan horisonaliting yaitu setiap pernyataan dengan pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disajikan bentuk naratif.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, dalam menganalisis data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

kualitatif, yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan aspek pelaksanaan kebijakan yang relevan dan merupakan celah ekspektasi antara kinerja pembangunan yang dicapai data ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

#### **Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Pada Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

##### **Urusan Wajib**

##### **1. Pendidikan**

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pendidikan meliputi :

- a) Kualitas pelayanan pendidikan belum merata diseluruh wilayah kota
- b) Distribusi tenaga guru menurut bidang kompetensi yang masih perlu disebarakan secara merata
- c) Sistem kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum tertata dengan baik
- d) Masih ada anak usia sekolah yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun

##### **2. Kesehatan**

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kesehatan meliputi :

- a) Distribusi tenaga medis yang belum tersebar merata sesuai kebutuhan masyarakat

- b) Persediaan obat dan perbekalan kesehatan dirasakan masih kurang memadai
- c) Masih perlu dikembangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
- d) Masih perlu ditingkatkan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
- e) Kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan
- f) Kualitas pelayanan kesehatan relatif belum merata sehingga perlu diadakan standarisasi pelayanan kesehatan
- g) Angka kesakitan akibat penyakit menular cenderung meningkat
- h) Masih tingginya angka kesakitan lansia
- i) Belum tercapainya target imunisasi pada ibu hamil dan bayi
- j) Masih perlu dikembangkan infrastruktur dan sarana kesehatan yang memadai

### 3. Pekerjaan Umum

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pekerjaan umum meliputi :

- a) Belum memadainya jalan kota yang berkondisi baik dalam rangka meningkatkan interkoneksi dengan jalan provinsi dan jalan nasional untuk menunjang pemberdayaan lokasi-lokasi strategis dan potensial
- b) Dengan meningkatnya arus lalu lintas, perlu dibangun jembatan yang dengan lebar yang memadai dan desain struktur konstruksi yang aman dan nyaman
- c) Perlunya penambahan jaringan irigasi untuk meningkatkan layanan terhadap lahan pertanian
- d) Masih adanya permasalahan sanitasi di lingkungan permukiman
- e) Perlunya perbaikan dan sistem drainase kota sehingga dapat meminimalisir genangan-genangan air

### 4. Perumahan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan perumahan meliputi :

- a) Kebutuhan masyarakat akan air bersih belum maksimal terpenuhi
- b) Perlunya penataan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman
- c) Persentasi rumah layak huni masih minim

### 5. Tata Ruang

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan tata ruang meliputi :

- a) Belum ditetapkannya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana detailnya sehingga belum ada acuan yang sah mengenai pemanfaatan ruang
- b) Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum tersusun
- c) Masih rendahnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
- d) Masih sering terjadinya konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman

### 6. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan meliputi :

- a) Belum dilakukannya legalisasi Dokumen perencanaan RPJPD
- b) Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektoral
- c) Masih terbatasnya kajian-kajian yang dapat menunjang perencanaan pembangunan yang baik
- d) Ketersediaan data dalam menunjang perencanaan pembangunan masih belum memadai

### 7. Perhubungan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan perhubungan meliputi :

- a) Sistem pengawasan atas kelaikan kendaraan angkutan masih belum maksimal

- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas perhubungan
- c) Adanya pembangunan ruas-ruas jalan baru perlu ditindaklanjuti dengan pengadaan rambu-rambu dan sarana prasarana perhubungan yang lain
- d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas

#### 8. Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan lingkungan hidup meliputi :

- a) Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan struktur lingkungan
- b) Belum terlaksananya sistem penanganan sampah yang terpadu
- c) Kebutuhan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk belum terpenuhi
- d) Perlunya sosialisasi hukum lingkungan
- e) Pengawasan pengelolaan limbah B3 belum optimal
- f) Belum efektifnya pelaksanaan penetapan status mutu air
- g) Sistem pengendalian potensi sumber pencemaran air belum berjalan secara maksimal
- h) Belum terlaksananya pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau

#### 9. Pertanahan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pertanahan meliputi :

- a) Masih banyak terdapat kasus perebutan hak milik tanah
- b) Kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah masih rendah
- c) Masih banyak terdapat lahan yang belum memiliki status kepemilikan yang sah

#### 10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi :

- a) Masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP
- b) Database kependudukan belum valid, dikarenakan masih ada penduduk yang memiliki KTP ganda dan yang belum terdaftar
- c) Masih rendahnya tingkat kepemilikan akte kelahiran bagi anak yang baru lahir

#### 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi :

- a) Belum maksimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baik secara kuantitas ataupun secara kualitas
- b) Masih rendahnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan
- c) Pengawasan terhadap pekerja anak belum intensif

#### 12. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan KB dan KS meliputi :

- Meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
- Prevalensi peserta KB aktif

#### 13. Sosial

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan sosial meliputi :

- a) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum efektif
- b) Belum seluruh PMKS yang memperoleh bantuan sosial

#### 14. Ketenagakerjaan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan meliputi :

- a) Tingkat partisipasi angkatan kerja lokal masih minim
- b) Lapangan pekerjaan belum memadai, masih banyak penduduk lokal yang harus bekerja diluar daerah
- c) Tingkat keahlian dan keterampilan pekerja secara spesifik di sektor-sektor tertentu relatif masih rendah

#### 15. Koperasi dan UMKM

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan koperasi dan UMKM meliputi :

- a) Jumlah koperasi yang aktif masih rendah
- b) Pemberdayaan sumber daya koperasi belum berjalan maksimal
- c) Masih minimnya bantuan perkuatan koperasi

#### 16. Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan penanaman modal meliputi :

- a) Laju pertumbuhan angka realisasi PMDN per tahun tidak stabil, terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan
- b) Belum terciptanya infrastruktur yang kondusif untuk menarik perhatian para investor
- c) Masih kurangnya koordinasi antara instansi dalam menunjang investasi
- d) Masih terdapat aturan yang tumpang tindih mengenai investasi

#### 17. Budaya

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan budaya meliputi :

- a) Di era globalisasi sekarang ini, telah banyak terjadi pergeseran budaya di masyarakat
- b) Belum adanya usaha-usaha yang serius dari masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan kekayaan budaya

c) Masih minimnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya

#### 18. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga meliputi :

- a) Masih banyak potensi sumber daya kepemudaan yang belum tergali dan dimanfaatkan
- b) Tidak adanya gelanggang/ balai untuk menunjang aktivitas kegiatan-kegiatan dalam bidang kepemudaan
- c) Belum tersedianya lapangan olahraga yang memadai

#### 19. Kesbang dan Politik

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kesbang dan politik meliputi :

- a) Kegiatan lintas agama belum rutin dilaksanakan
- b) Koordinasi antar umat beragama belum berjalan efektif
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM belum berjalan dengan optimal
- d) Terjadi peningkatan jumlah pengguna Narkoba
- e) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba

#### 20. Otonomi Daerah

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan otonomi daerah meliputi :

- a) Aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah belum berjalan dengan baik
- b) Masih rendahnya indeks kepuasan layanan masyarakat
- c) Pemekaran wilayah kelurahan belum ditangani dan dipersiapkan dengan matang

#### 21. Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan ketahanan pangan meliputi :

- a) Ketersediaan bahan pangan untuk penduduk lokal belum terpenuhi, masih tergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah
- b) Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsumsi dan keamanan pangan
- c) Pelatihan dan penyuluhan petani belum berjalan secara efektif dan efisien

#### 22. Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a) Kualitas sumber daya aparatur kelurahan masih tertinggal jauh dibandingkan aparatur pemerintah instansi lainnya
- b) Pendidikan dan pelatihan aparatur kelurahan untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat belum memadai
- c) Masih rendahnya tingkat pengetahuan aparatur terhadap sistem lembaga kelurahan

#### 23. Kearsipan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan kearsipan meliputi :

- a) Penerapan pengelolaan arsip secara baku belum berjalan dengan baik
- b) Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petugas pengelolaan kearsipan

#### 24. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika meliputi :

- a) Pemerintah belum memiliki fasilitas resmi informasi perkotaan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat atau pun turis dari mancanegara di lokasi-lokasi tertentu

- b) Belum tersosialisasinya program-program pemerintah dengan baik
- c) Masih lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi
- d) Belum tersedianya infrastruktur dan aplikasi dasar teknologi informasi

#### 25. Perpustakaan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi berkaitan dengan urusan perpustakaan meliputi :

- a) Masih rendahnya kuantitas koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
- b) Kesadaran masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan dan membaca buku terus menurun akibat kemajuan teknologi informasi via internet

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di kota Tomohon diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda. berdasarkan penilaian setiap indikator yaitu :

1. pelaksanaan fungsi Bappeda di Kota Tomohon dikategorikan masih belum bisa dikatakan baik tetapi masih cukup. Hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon yakni kebanyakan responden yaitu 38 % menilai cukup, serta yang menilai baik yaitu 33 %. Namun masih ada responden yang menilai kurang baik yaitu 29 %, Artinya bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda tidak menutup kemungkinan menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan, hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan

fungsi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan

#### DAFTAR PUSTAKA

Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-struktur-proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.

Penerbit Erlangga.

Husaini, Purnomo. 2009. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*.

Jakarta. Departemen Ilmu Administrasi FISIP

Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya

Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*

*Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.

Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.

Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABET.

Sutarto. 2009.

- Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Walikota Tomohon tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan dan Struktur Organisasi
- Permendagri 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara

#### **Sumber-sumber Lain:**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Presiden No 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah